

LAPORAN KEGIATAN  
PROGRAM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

**PELATIHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DANA DESA  
BAGI PERANGKAT DESA DI KECAMATAN GAMPING SLEMAN**



Tim Pengabdi:

Abdullah Taman, M.Si., Ak. CA.  
Dhyah Setyorini, M.Si., Ak. CA  
Dr. Denies Priantinah, M.Si., Ak. CA  
Rudi Prasetya Timur

PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2015

---

PENGABDIAN PADA MASYARAKAT INI DIBIYAI DENGAN DANA DIPAA  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
SK DEKAN FE UNY NOMOR: 505 TAHUN 2015, TANGGAL 17 APRIL 2015  
SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
NOMOR: 548/UN34.18/PM/2015, TANGGAL 21 APRIL 2015



KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
**FAKULTAS EKONOMI**

Alamat: Kampus Karangmalang Yogyakarta, 55281  
Telp/Fax. (0274) 554902, (0274)586168 psw. 821, 817, 823, 810, 812, 813, 815, 816  
Website: <http://fe.uny.ac.id> e-mail: [fe@uny.ac.id](mailto:fe@uny.ac.id)

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN KEGIATAN PPM**

Judul:

**PELATIHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DANA DESA  
BAGI PERANGKAT DESA DI KECAMATAN GAMPING SLEMAN**

1. Mitra Program PPM : Kecamatan Gamping
2. Ketua Tim Pengabdi
  - a. Nama : Abdullah Taman, M.Si., Ak. CA
  - b. NIP : 19630624 199001 1 001
  - c. Pangkat/Golongan/Jabatan : Penata /IIIc/Lektor
  - d. Jurusan/Fakultas : Pendidikan Akuntansi/Ekonomi
  - e. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta
  - f. Bidang Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
  - g. Alamat Kantor/Telp/Faks/Email : FE UNY Kampus Karangmalang Yogyakarta  
(0274) 586186 psw 825
  - h. Alamat Rumah/Telp/Faks/Email : Tapan-Karanglo RT 06 RW 01 No. 30, Purwomartani,  
Kalasan, Sleman 57771, Yogyakarta , 0811 250575,  
[abtaman63@yahoo.co.id](mailto:abtaman63@yahoo.co.id)
3. Anggota Tim Pengabdi
  - a. Jumlah Anggota : Dosen 2 orang
  - b. Nama Anggota I/bidang keahlian: Dhyah Setyorini, M.Si., Ak., CA/Akuntansi
  - c. Nama Anggota II/bidang keahlian: Dr. Denies Priantinah, M.Si., Ak., CA/ Akuntansi
  - d. Mahasiswa yang terlibat : 1 orang
4. Lokasi Kegiatan/Mitra : Kecamatan Gamping
5. Luaran yang Dihasilkan : Perangkat desa di Kecamatan Gamping memiliki pengetahuan tentang penyusunan laporan keuangan dana desa
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 5 bulan
7. Biaya Total : Rp5.000.000,00

Yogyakarta, Oktober 2015

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Pendidikan Akuntansi

Ketua Pelaksana

Prof. Sukirno, M.Si., Ph.D.  
NIP. 19690414 199403 1 002

Abdullah Taman M.Si., Ak.CA  
NIP. 19630624 199001 1 001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. Sugiharsono, M.Si.  
NIP. 19550328 198303 1 002

## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN KEGIATAN PPM.....         | ii |
| Abstrak.....   | 1  |
| BAB I.....   | 3  |
| PENDAHULUAN.....                                     | 3  |
| 1. Analisis Situasi.....                             | 3  |
| 2. Kajian Pustaka.....                               | 4  |
| 3. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....           | 7  |
| 4. Tujuan Kegiatan.....                              | 8  |
| 5. Manfaat Kegiatan.....                             | 8  |
| BAB II.....  | 10 |
| METODE KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT.....      | 10 |
| 1. Khalayak Sasaran.....                             | 10 |
| 2. Waktu dan Tempat.....                             | 10 |
| 3. Metode Kegiatan.....                              | 10 |
| 4. Langkah-langkah Kegiatan.....                     | 10 |
| 5. Faktor Pendukung dan Penghambat.....              | 11 |
| BAB III.....   | 12 |
| PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT..... | 12 |
| 1. Hasil Pelaksanaan Kegiatan.....                   | 12 |
| 2. Pembahasan.....                                   | 13 |
| BAB IV.....  | 15 |
| SIMPULAN DAN SARAN.....                              | 15 |
| 1. Simpulan.....                                     | 15 |
| 2. Saran.....  | 15 |
| DAFTAR PUSTAKA.....                                  | 17 |
| Lampiran.....  | 1  |

## **PELATIHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DANA DESA BAGI PERANGKAT DESA DI KECAMATAN GAMPING SLEMAN**

### **Abstrak**

Dana desa yang diberikan pemerintah pusat bertujuan untuk mendorong produktivitas masyarakat pedesaan. Untuk itu, penggunaan dana desa harus direncanakan, dilaksanakan dan dilaporkan untuk menilai tingkat keberhasilan program dana desa. Dalam rangka mensukseskan program dana desa ini, tim pengabdian kegiatan pengabdian kepada masyarakat Prodi Akuntansi FE UNY menyelenggarakan “Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Dana Desa bagi Perangkat Desa di Kecamatan Gamping, Sleman”. Tujuan dari penyelenggaraan PPM Dana Desa di Kecamatan Gamping ini untuk: 1). Memberikan pengetahuan yang memadai mengenai pelaporan keuangan Dana Desa dan 2). Memberikan pelatihan untuk membuat laporan keuangan Dana Desa

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2015, dengan dihadiri oleh 27 (67,5%) khalayak sasaran (perangkat desa di Kecamatan Gamping). Adapun pelaksanaan kegiatan pelatihan ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tutorial, dan diskusi.

Kegiatan pelatihan penyusunan laporan keuangan dana desa bagi perangkat desa di Kecamatan Gamping Sleman berjalan dengan lancar. Semua peserta antusias mengikuti acara hingga selesai dan merasakan manfaat pelatihan bagi perencanaan dan kemajuan desa dimana mereka mengabdikan. Peserta pelatihan juga menilai bahwa pelatihan ini penting dan sangat diperlukan bagi perangkat desa. Peserta pelatihan berharap pelatihan serupa dapat dilaksanakan kembali dengan peserta (*audience*) yang lebih banyak/luas, dan dengan topik lainnya.

Kata kunci: pelaporan keuangan, dana desa

## **TRAINING OF THE FUND VILLAGE FINANCIAL REPORTING FOR THE VILLAGE OFFICERS IN KECAMATAN GAMPING SLEMAN**

### **Abstract**

Village funds given by central government aims to boost rural productivity. To that end, the use of village funds should be planned, implemented and reported to assess the success of the village fund program. In order to succeed the village fund program, the community service team of FE UNY devotee community service activities such as the "Training of Fund Village Financial Reporting for the Village Officers in Kecamatan Gamping, Sleman". The purposes of the community service are: 1). Provide adequate knowledge regarding financial reporting of Village Fund and 2). Provide training to make the financial statements of the Village Fund

This training was conducted in October 2015, attended by 27 (67.5%) the target audience (the village officers in Kecamatan Gamping). The implementation of these training activities carried out by using methods lectures, tutorials, and discussion.

Training activities preparation of financial statements village funds for the village in the district of Sleman Gamping running smoothly. All participants enthusiastically followed the event to finish and feel the benefits of training for the planning and progress of the village where they serve. The training participants also considered that this training is important and indispensable for the village. Trainees expect similar training can be carried back to the participants (audience) more / wide, and with other topics.

Keywords: financial reporting, the village fund

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Analisis Situasi

Perhatian negara dalam membangun desa tidak diragukan lagi. Bukti keseriusan negara dalam membangun desa diwujudkan dengan keluarnya UU Desa no. 6 tahun 2014 dan PP Desa No 43 tahun 2014. Kedua aturan hukum ini memberikan kesempatan kepada seluruh desa di Indonesia untuk mendapatkan Dana Desa sebesar 1 milyar yang berasal dari Dana Desa dari Pemerintah Pusat sebesar 750 juta dan Alokasi Dana Desa di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota sebesar 250 juta. Adapun penggunaan dana tersebut dihimbau untuk pembangunan infrastruktur desa seperti jalan desa untuk membuka akses kantong-kantong produksi, irigasi desa dan program yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat desa. Dana desa yang diberikan oleh negara ini bertujuan agar desa menjadi lebih produktif. Peningkatan produktivitas desa ini dilihat dari perkembangan ekonominya meningkat, tingkat masyarakat yang bekerja dan memiliki usaha bertambah, kualitas hidup termasuk kesehatan pun menjadi lebih baik. Dengan adanya Dana Desa ini maka potensi desa yang belum tergali dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberi nilai tambah (*value added*) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah berharap dengan kucuran dana tersebut maka seluruh desa di Indonesia dapat menjadi desa yang mandiri dan sejahtera.

Dengan turunnya Dana Desa ini, maka diperlukan perencanaan, pengelolaan, pelaporan dan pengawasan yang baik agar tujuan pemberian Dana Desa efektif dan efisien. Turunnya Dana Desa ini perlu pengawalan dari berbagai pihak agar berjalan sesuai dengan tujuannya. Jika pengawalan atau pendampingan ini tidak dilakukan maka dikhawatirkan akan muncul berbagai permasalahan mulai dari perencanaan, pengelolaan, pelaporan hingga pengawasannya.

Perencanaan yang baik akan menjadi arah panduan program apasaja yang sebaiknya dilaksanakan oleh desa. Pada tahap ini analisis kebutuhan dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan ataupun permasalahan yang perlu segera ditangani dengan bantuan Dana Desa. Sebaliknya, jika perencanaan tidak dilakukan secara memadai, misalnya melibatkan semua aspek/elemen desa, maka perencanaan penggunaan Dana Desa tidak optimal mengakomodasi kebutuhan desa. Upaya menggali potensi desa menjadi gagal.

Selanjutnya pada tahap pengelolaan Dana Desa, muncul beberapa kekhawatiran seperti: kesiapan SDM dalam menjalankan program yang telah direncanakan, pemahaman

(interpretasi) bagaimana mengelola atau menggunakan Dana Desa tidak sama antara satu desa dengan desa lainnya. Jika hal ini dibiarkan maka potensi pengelolaan atau penggunaan dana desa tidak sesuai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dapat terjadi, dan pada akhirnya penyimpangan pelaksanaan terjadi.

Permasalahan pada tahap pelaporan keuangan Dana Desa sendiri dinilai masih membingungkan karena Dana Desa ini baru turun tahap pertama di bulan April 2015 ini. Apabila SDM di desa tidak menguasai pelaporan keuangan maka pada akhir tahun 2015, diduga muncul banyak keluhan dari desa terkait dengan pelaporan keuangan Dana Desa. Pelaporan Dana Desa ini tidak dapat dihindari karena pelaporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas desa kepada pemangku kepentingan, diantaranya masyarakat dan negara (pemerintah pusat). Dengan demikian, pelaporan keuangan Dana Desa menjadi keharusan, dan potensi masalah pun sudah tampak di depan mata jika kesiapan SDM tidak memadai/mendukung.

Jumlah Dana Desa yang cukup besar ini memerlukan pengawasan. Pengawasan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. Pembinaan dan pengawasan ini dapat didelegasikan kepada perangkat desa atau BPD (badan musyawarah desa). Adapun hal-hal apa saja yang perlu diawasi juga masih menjadi belum begitu jelas meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Desa no. 6 tahun 2014. Bagaimana implementasi pengawasan Dana Desa belum dapat diketahui secara teknis, sehingga masih ada kekhawatiran apakah pelaksanaan pengawasan ini mampu mengawal pelaksanaan Dana Desa dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan berbagai uraian masalah atau tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah desa terkait dengan turunnya Dana Desa ini, maka Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) FE UNY menilai perlu melakukan pendampingan bagaimana menyusun pelaporan keuangan Dana Desa. Hal ini didasari pertimbangan, turunnya Dana Desa untuk yang pertamakali di bulan April 2015 dan kebutuhan yang mendesak untuk melakukan pencatatan keuangan yang andal dan transparan sebagai bentuk akuntabilitas. Dengan adanya pelatihan ini maka diharapkan pemerintah desa dapat menjalankan amanah dan menjaga kepercayaan publik.

## **2. Kajian Pustaka**

### **A. Tujuan dan Fungsi Pelaporan Keuangan Sektor Publik**

Pemerintahan desa sebagai organisasi sektor publik wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dasar pengambilan keputusan. Dengan adanya pelaporan keuangan sektor publik (pemerintah desa) ini maka:

- 1) Memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan bahwa pengelolaan sumberdaya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan.
- 2) Memberikan akuntabilitas kepada publik dan sebagai alat pengawasan dan penilaian kinerja. Dengan akuntabilitas publik ini maka masyarakat dapat menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya.
- 3) Memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang serta memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.
- 4) Memberikan informasi kepada publik mengenai kelangsungan hidup/usaha organisasi publik dalam menyediakan barang/jasa di masa yang akan datang.
- 5) Menjadi alat komunikasi dan media untuk menunjukkan prestasi yang sudah dicapai oleh organisasi publik.
- 6) Menjadi sumber informasi bagi berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui yang ingin mengetahui kinerja organisasi profesi.

## **B. Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik**

Pemakai laporan keuangan sektor publik, menurut standar akuntansi pemerintahan, dapat dibagi menjadi empat yaitu:

- 1) Masyarakat;
- 2) Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- 3) Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman;
- 4) Pemerintah.

## **C. Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik dengan Laporan Keuangan Sektor Swasta**

Perbedaan laporan keuangan sektor publik dengan laporan sektor swasta, meliputi beberapa aspek antara lain:

- 1) Fokus dan lingkup laporan keuangan. Laporan keuangan sektor publik memfokuskan pada masalah finansial dan politik, sehingga kinerja pemerintah diukur berdasarkan aspek finansial dan nonfinansial. Lingkup laporan keuangan pemerintah pada bagian organisasi, sedangkan laporan keuangan sektor swasta pada organisasi secara keseluruhan.

- 2) Akuntabilitas. Pertanggungjawaban laporan keuangan sektor publik ditujukan pada pihak legislatif/parlemen dan masyarakat, sedangkan laporan keuangan sektor swasta kepada pemegang saham dan kreditur.
- 3) Orientasi laporan keuangan. Laporan keuangan sektor publik berorientasi jangka panjang mengikuti konsep politik dan kenegaraan, sedangkan laporan keuangan sektor swasta berorientasi secara jangka panjang, namun tidak mendetil karena dibatasi oleh adanya ketidakpastian pasar.
- 4) Aturan pelaporan. Aturan pelaporan dalam laporan keuangan sektor publik ditentukan oleh standar akuntansi pemerintah (SAP), sedangkan akuntansi sektor swasta ditentukan oleh standar akuntansi keuangan, pasar modal, dan praktik sehat.
- 5) Pihak pemeriksa. Laporan keuangan sektor publik diperiksa oleh BPK, sedangkan laporan keuangan sektor swasta diperiksa oleh auditor independen.
- 6) Penggunaan dasar akuntansi. Laporan keuangan sektor swasta telah menggunakan dasar akuntansi akrual. Laporan keuangan sektor publik belum sepenuhnya menggunakan dasar akuntansi akrual.

#### **D. Bentuk-bentuk Laporan Keuangan Sektor Publik:**

Bentuk laporan sektor publik menurut standar akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut:

##### 1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang berisi tentang informasi realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut.

##### 2) Neraca

Neraca adalah laporan yang memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Neraca menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah pada tanggal tertentu.

##### 3) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang memberikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan operasional, investasi, pembiayaan, dan transaksi nonanggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

##### 4) Catatan atas Laporan

Catatan atas laporan keuangan mencakup penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

5) Laporan Kinerja Keuangan

Laporan kinerja keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam laporan ini disajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi, surplus atau defisit.

6) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

### **E. Pelaporan Keuangan untuk Dana Desa**

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Adapun pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

### **3. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- 1) Proses perencanaan yang tidak memadai, misalnya tidak melibatkan semua aspek/elemen desa, maka perencanaan penggunaan Dana Desa tidak optimal mengakomodasi kebutuhan desa. Upaya menggali potensi desa menjadi gagal.
- 2) Kesiapan SDM dalam menjalankan program yang telah direncanakan, pemahaman (interpretasi) bagaimana mengelola atau menggunakan Dana Desa tidak sama antara satu desa dengan desa lainnya.
- 3) Muncul potensi pengelolaan atau penggunaan dana desa tidak sesuai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dapat terjadi, dan pada akhirnya penyimpangan pelaksanaan terjadi.
- 4) Pelaporan keuangan Dana Desa sendiri dinilai masih membingungkan karena Dana Desa ini baru turun tahap pertama di bulan April 2015 ini.
- 5) Kesiapan SDM di desa dalam menyusun pelaporan keuangan belum memadai.

- 6) Aspek-aspek yang harus diawasi dalam pengelolaan Dana Desa belum begitu jelas meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Desa no. 6 tahun 2014.
- 7) Implementasi pengawasan Dana Desa belum dapat diketahui secara teknis, sehingga masih ada kekhawatiran apakah pelaksanaan pengawasan ini mampu mengawal pelaksanaan Dana Desa dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dibatasi pada tahap penyusunan laporan keuangan untuk Dana Desa. Dengan demikian, rumusan masalah dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah:

“Bagaimana penyusunan laporan keuangan untuk Dana Desa?”

#### **4. Tujuan Kegiatan**

Tujuan kegiatan PPM ini adalah

- 1) Memberikan pengetahuan yang memadai mengenai pelaporan keuangan Dana Desa.
- 2) Memberikan pelatihan untuk membuat laporan keuangan Dana Desa.

#### **5. Manfaat Kegiatan**

Manfaat kegiatan PPM ini adalah:

- 1) Manfaat untuk Kelompok Sasaran

Bagi para perangkat desa, dapat membantu mereka dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku.

- 2) Manfaat untuk Tim Pengabdian

Bagi Tim Pengabdian, pelatihan penyusunan laporan keuangan bagi perangkat desa ini dapat memberikan pengalaman dan sekaligus sebagai wahana untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, khususnya pemberian pelatihan penyusunan laporan keuangan Dana Desa Gamping.

- 3) Manfaat untuk Pengambil Kebijakan di UNY dan Perangkat Desa di Kecamatan Gamping, Sleman.

Bagi Pimpinan dan para staf akademik maupun non akademik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta dan juga Pimpinan dan para perangkat desa di Kecamatan Gamping, Sleman diharapkan dapat terjalin kerja sama yang semakin erat di masa mendatang, sehingga dapat memberikan kontribusi positif pada kedua belah pihak.

## **BAB II**

### **METODE KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

#### **1. Khalayak Sasaran**

Khalayak sasaran yang diundang pada pelatihan ini adalah para perangkat desa di kecamatan Gamping, Sleman sebanyak 40 orang. Undangan yang hadir pada pelatihan ini sebanyak 27 orang peserta atau 67,5%. Penetapan sasaran ini merupakan suatu upaya peningkatan pemahaman penyusunan laporan keuangan Dana Desa bagi perangkat desa di Kecamatan Gamping, Sleman.

#### **2. Waktu dan Tempat**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Minggu, 4 Oktober 2015, jam 08.00-12.00. Adapun tempat pelaksanaannya di Westlake Resto, Kecamatan Gamping.

#### **3. Metode Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tutorial, dan diskusi.

#### **4. Langkah-langkah Kegiatan**

Adapun sistematika pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Langkah 1 (Metode Ceramah):**

Peserta diberikan motivasi agar memiliki minat dan motivasi berwirausaha. Selain itu, peserta diberikan materi pentingnya pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Langkah pertama diselenggarakan selama 1,5 jam.

##### **2. Langkah 2 (Metode Tutorial):**

Peserta pelatihan diberikan materi bagaimana menyusun laporan keuangan yang memadai sebagai bentuk pertanggungjawaban. Langkah kedua diselenggarakan selama 5 jam.

##### **3. Langkah 3 (Metode Diskusi):**

Peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yang selama ini mereka dihadapi. Langkah ketiga diselenggarakan selama 1,5 jam.

Disamping langkah 1, 2, dan 3 direncanakan diadakan pendampingan menyusun laporan keuangan selama 8 jam dengan jadwal menyesuaikan peserta khalayak sasaran sehingga jumlah jam pengabdian masyarakat terpenuhi 16 jam.

## **5. Faktor Pendukung dan Penghambat**

Secara umum acara pelatihan penyusunan laporan keuangan dana desa ini berjalan dengan lancar. Hal ini dicapai berkat kerjasama yang baik antara tim PPM FE UNY dengan Kecamatan Gamping, sehingga kegiatan PPM tidak mengalami hambatan dan kendala yang berarti. Kerjasama antara Tim PPM FE UNY dengan Kecamatan Gamping tidak hanya dalam hal penyelarasan kebutuhan materi pelatihan yang diinginkan oleh Kecamatan Gamping, melainkan juga dalam hal pendanaan. Kegiatan PPM ini sebagian juga didanai oleh Kecamatan Gamping. Seluruh peserta PPM menyambut baik acara pelatihan ini sehingga berkeinginan agar kegiatan pelatihan ini kepada tetap berlanjut di masa yang akan datang. Peserta pelatihan juga menilai bahwa pelatihan ini penting dan sangat diperlukan bagi perangkat desa. Berdasarkan hasil penilaian peserta pelatihan, 19,05% peserta menyatakan “sangat setuju” materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan kerja, 80,95% menyatakan “setuju”, dan 4,76% sisanya menyatakan “tidak setuju” bahwa materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan kerja. Terkait dengan penilaian pemahaman materi yang disampaikan. Hasilnya menunjukkan sebagai berikut: 14,29% peserta menyatakan “sangat paham”, 52,38% menyatakan “paham”, 23,81% menyatakan “netral” dan sisanya sebesar 4,76% menyatakan “tidak paham” materi pelatihan yang disampaikan.

### BAB III

#### PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

##### 1. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pelatihan penyusunan laporan keuangan dana desa di Kecamatan Gamping, Sleman dilaksanakan dalam 1 hari. Adapun susunan acara pelatihan sebagai berikut:

| Hari, Tanggal          | Waktu                     | Materi  | Ket  |
|------------------------|---------------------------|---|--|
| Minggu, 4 Oktober 2015 | 08.00-09.00               | Registrasi peserta dan Pembukaan                    | Panitia dan Kecamatan Gamping                      |
|                        | 09.00-09.30<br>(30 menit) | Coffe break   |  |
|                        | 09.30-10.30<br>(2 jam)    | Materi I  | Budi Hartono,<br>M.Si.<br>(DPKKA Kab. Kulon Progo) |
|                        | 10.30-11.30               | Materi 2  | Abdullah Taman,<br>M.Si, Ak.,<br>CA (FE UNY)       |
|                        | 11.30-12.00<br>(30 Menit) | Tanya Jawab   | Narasumber materi I dan 2                          |
|                        | 12.00                     | Makan siang dan penutup                             |  |
| Tidak terjadwal        | 10 jam                    | Pendampingan konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan |  |

| <b>Hari,<br/>Tanggal</b>                    | <b>Waktu</b> | <b>Materi</b>  | <b>Ket</b> |
|---|--------------|--|------------|
| (mulai 4<br>Oktober-20<br>November<br>2015) |              | Dana Desa di Kecamatan Gamping.<br>(pendampingan dilakukan melalui<br>email, konsultasi ke FE UNY) |            |

## **2. Pembahasan**

Pelatihan penyusunan laporan keuangan dana desa bagi perangkat desa di Kecamatan Gamping, Sleman yang diadakan pada hari Rabu, 4 November 2015 berjalan dengan lancar. Pelatihan diawali dengan pengantar dari Bapak Camat Gamping. Selanjutnya, sesi pertama dibuka dengan materi pengantar pengelolaan dana desa. Pada materi ini peserta pelatihan memberikan materi mengenai dasar aturan pengelolaan dana desa. Selain itu, narasumber (Bapak Budi Hartono, M.Si. dari DPPKA Kabupaten Kulon Progo) memberikan ilustrasi perbandingan bagaimana pengelolaan atau menggunakan dana yang ada di desa sebelum dan sesudah UU dana Desa dikeluarkan. Selanjutnya materi mengenai penyusunan anggaran dan bagaimana anggaran diperoleh di desa. Pada sesi ini terdapat penjelasan perubahan paradigma/konsep mengenai pendapatan dan pembiayaan.

Pada sesi kedua tim PPM FE UNY menyampaikan materi bagaimana menyusun laporan keuangan dana desa. Pada sesi ini diawali dengan penjelasan detil/teknis penyaluran dana desa (bagaimana dana desa turun) dan bagaimana penggunaan dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku. Materi sesi dua ini juga dilengkapi dengan pemantauan dan evaluasi penggunaan dana desa. Penundaan dan pemotongan penyaluran dana desa juga dijelaskan oleh narasumber, pada saat penjelasan materi sanksi penyalahgunaan dana desa.

Sesi ketiga diisi dengan tanya jawab. Pada sesi ini peserta menunjukkan antusias bertanya kepada tim PPM. Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta pelatihan antara lain: keterlambatan turunnya dana desa (penyaluran dana desa), masalah pajak dana desa (masih banyak yang belum memiliki npwp), penyusunan laporan keuangan dana desa. SILPA apakah masuk ke pembiayaan

Kesulitan ataupun hambatan yang dialami tim pengabdian relatif tidak begitu banyak, karena kegiatan PPM ini mendapat bantuan dari kecamatan Gamping. Kegiatan PPM

penyusunan laporan keuangan dana desa dibiayai oleh dua instansi, dari Prodi Akuntansi FE UNY dan kecamatan Gamping. Hal yang perlu menjadi catatan adalah kerjasama antar institusi sangat berguna dalam mendukung kelancaran kegiatan PPM. Di masa yang akan datang, kegiatan PPM akan lebih baik apabila institusi/khalayak sasaran juga berperan serta dalam kegiatan/penyelenggaraan PPM.

## **BAB IV**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **1. Simpulan**

Kegiatan pelatihan penyusunan laporan keuangan dana desa bagi perangkat desa di Kecamatan Gamping Sleman berjalan dengan lancar. Semua peserta antusias mengikuti acara hingga selesai dan merasakan manfaat pelatihan bagi perencanaan dan kemajuan desa dimana mereka mengabdikan.

#### **2. Saran**

Pelatihan serupa dapat dilaksanakan kembali dengan peserta (audience) yang lebih banyak/luas, dan dengan topik lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

April 2015, Dana Desa akan Dikucurkan Bertahap. RRI.co.id. Kamis 25 Maret 2015 10:54:45.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Moh Mahsun, Firma Sulistyowati, Heribertus Andre Purwanegara (2013). Akuntansi Sektor Publik, Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE



# Lampiran